

ABSTRAK

Almukram. 2022. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik antara PT. Perkebunan Nusantara dan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang. (Di Bimbing oleh Dr. Jaelan Usman, M.SI dan Ahmad Taufik, S.IP., M. AP).

Penelitian untuk Mengetahui sebab terjadinya konflik antara masyarakat dan PT. Perusahaan Nusantara Serta Menganalisis Peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PT. Perusahaan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang, Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Maiwa dan PT. Perusahaan Nusantara sendiri dan Pemerintah kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi, panduan wawancara, alat perekam suara, kamera. Dalam teknik analisis data penelitian menggunakan reduksi data, sajian data, dan verivikasi.

Hasil penelitian ini di temukan bahwa, Peran pemerintah dalam menangani konflik antara PT. Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang: 1). Mediasi. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten Enrekang melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan dua bela pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaimana mestiya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran fasilitator telah memberikan Penangan terhadap konflik antara masyarakat dengan PT/PN Keera Unit Maruangin sedikit demi sedikit. Pemerintah kabupaten Enrekang tetap memberikan solusi dan jalan keluar dengan melakukan mediasi. 2). Penanganan , dalam hal ini. Pemerintah telah mempertemukan kedua belah pihak baik antara Masyarakat Maiwa dan pihak PT.Perusaan Nusantara namun masih terkendala karena pihak PT. Perusaan Nusantara selalu bersikukuh bahwa mereka berkerja sudah sesuai dengan prosudur yang telah di sepakati dalam kontrak tahunan 3). Verivikasi Lahan, dalam hal ini. Pemerintah Enrekang sudah melakukan verivikasi dan mengembalikan lahan masyarakat, akan pengembalian lahan yang dilakukan pemerintah tidak adil dan tidak merata. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi sudah tepat mempertemukan kedua belah pihak yakni Masyarakat dengan PT.PN Keera Unit Maruangin dan juga Pemerintah Enrekang melakukan verifikasi lahan tersebut harus hati-hati karena potensi konflik besar kemungkinan akan terjadi karena warga mengklaim tanah yang selama ini dikuasai oleh PT.PN hanya mengandalkan bukti alam saja tidak secara adminitrasi atau tidak mempunyai sertifikat tanah.

Kata Kunci : Peran Pemerintah. Konflik PT. Perusaan dan Masyarakat